

**FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KOTA DAN KABUPATEN
DI PROPINSI KALIMANTAN SELATAN**

Ida Mentayani¹, Nurul Hayati² dan Rusmanto¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Nasional Banjarmasin

Jalan Mayjend Sutoyo S No. 126 Banjarmasin

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin

Jalan H. Hasan Basri No. 9 – 11 Kayu Tangi Banjarmasin Telp. 0511-3304652

Artikel info

Keywords:

regional original income,
general allocation fund,
regional expenditure, flypaper
effect

Abstract

This research aims to give empirical evidence on the effects of the regional original income (PAD/Pendapatan Asli Daerah) and the general allocation fund (DAU/Dana Alokasi Umum), both simultaneously and partially, to the regional expenditure (BD/Belanja Daerah) of the city and district government in the South Kalimantan province along with the flypaper effect that follows it. Secondary data are used in this research, including the regional original income, the general allocation fund, and the regional expenditure data in the quarterly regional budget realization report, both in the city and district level in South Kalimantan province in year 2010. The model that was used to analyze the data or to test the hypotheses is the Multiple Linear Regression model. According to the research results, it can be concluded that the regional original income and the general allocation fund are simultaneously and significantly affecting the regional expenditure in the cities in the South Kalimantan province. Moreover, when the test was held partially, it is known that each of those factors still has significant impacts on the regional expenditure in the same cities. It is also known that in the 2010 regional budget realization report, the effects that the regional original income has on the regional expenditure are bigger than what the general allocation fund has. With this result, it can be concluded that flypaper effect did not happen on the regional finance of the city and district government in South Kalimantan province in 2010.

PENDAHULUAN

Otonomi Daerah merupakan realisasi dari ide desentralisasi. Daerah otonom merupakan wujud nyata dan dianutnya asas devolusi dan dekonsentrasi sebagai makna dari desentralisasi sendiri. Dalam konteks ini otorisasi dipahami secara fungsional, maksudnya orientasi otonomi seharusnya sebagai upaya pemaksimalan fungsi pemerintah (pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan) agar dapat dilakukan secepat, sedekat dan setepat mungkin dengan kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah, kinerja pemerintah daerah terukur melalui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kaho (1997) menyatakan bahwa salah satu kriteria penting mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah *self-supporting* dalam bidang keuangan. Hal ini berarti bahwa keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, dengan demikian Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri, termasuk mandiri dalam masalah keuangan. Meskipun demikian Pemerintah Pusat tetap memberi bantuan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana yang tercantum pada UU No.32 tahun 2004. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian dae-

rah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Di samping dana perimbangan tersebut, pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan dan lain-lain pendapatan. Kebijakan pendanaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

PAD idealnya merupakan sumber sumber pendapatan pokok daerah. Sumber pendapatan lain dapat bersifat fluktuatif dan cenderung di luar pengendalian kewenangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD dengan tetap memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi dan netralitas.

Dalam kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari yang oleh Pemerintah daerah dilaporkan sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini disebabkan oleh perbedaan penafsiran mengenai DAU oleh daerah-daerah. Dalam Saragih (2003), berbagai penafsiran tersebut diantaranya: (a) DAU merupakan hibah yang diberikan pemerintah pusat tanpa ada pengecualian; (b) DAU tidak perlu dipertanggungjawabkan karena DAU merupakan konsekuensi dari penyerahan kewenangan atau tugas-tugas umum pemerintah ke daerah; dan (c) DAU harus dipertanggungjawabkan, baik masyarakat lokal maupun ke pusat, karena DAU berasal dari APBN.

Beberapa peneliti menemukan perlakuan Pemerintah daerah berbeda untuk transfer dan pendapatan sendiri (seperti pajak), ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulus atas belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulus yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Oates (dalam Halim, 2002)

menyatakan bahwa ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer dari pada pendapatannya sendiri disebut *flypaper effect*. Halim (2002) dan Sukriy (2003) melakukan penelitian adanya *flypaper effect* pada belanja daerah pemerintah kota atau kabupaten di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2001. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa *flypaper effect* terjadi pada DAU periode t-1 terhadap Belanja Daerah (BD) periode t. Kemudian Maimunah (2006) melakukan penelitian yang sama pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota di pulau Sumatra pada tahun 2003 dan 2004. Kusumadewi dan Rahman (2007) melakukan penelitian pada kota dan kabupaten di Indonesia. Hasil yang diperoleh konsisten dengan penelitian Halim (2002) dan Abdullah (2003) yaitu DAU pada periode t-1 memiliki pengaruh lebih besar dari pada PAD periode t-1 terhadap BD periode t. Namun ketika diuji pengaruh DAUt dan PADt secara bersamaan terhadap Belanja Daerah t, hasilnya PAD tidak signifikan dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Hasil penelitian tersebut tidak dapat digeneralisasi untuk daerah lainnya, karena tiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri baik dari sisi geografis, kehidupan masyarakat maupun kondisi ekonominya. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melengkapi hasil penelitian tersebut dengan melakukan penelitian pada daerah Kalimantan khususnya pada kota dan kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan mengenai pengaruh PAD dan DAU terhadap BD.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Memberikan bukti secara empiris bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) pada Kota dan Kabupa-

ten di Propinsi Kalimantan Selatan; (2) Memberikan bukti secara empiris bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) pada Kota dan Kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan; dan (3) Memberikan bukti empiris tentang terjadinya *flypaper effect* pada Belanja Daerah (BD) Kota dan Kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) menurut UU No.25 tahun 1999 berasal dari APBN dan dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Kemudian, dari 25% tersebut dibagi lagi menjadi menjadi 90% untuk DAU bagi daerah Kabupaten/Kota dan 10% untuk DAU bagi daerah propinsi. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, DAU berperan sebagai transfer yang bersifat *block grants*.

Salah satu peran DAU adalah untuk pemerataan horizontal (*horizontal equalization*) yaitu dengan menutup celah fiskal (*fiscal gap*) yang berada diantara kebutuhan fiskal dan potensi ekonomi yang dimiliki daerah. Sehingga kebutuhan DAU suatu daerah merupakan selisih antara kebutuhan daerah dengan potensi penerimaan daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2002) Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pasal 157 Undang-undang No.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Hasil pajak daerah, terdiri dari: jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah propinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan. Sedangkan jenis pajak daerah untuk kabupaten terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C.
- 2) Hasil retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ada tiga jenis golongan retribusi daerah retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam jenis pendapatan ini adalah deviden yang diperoleh BUMD yang dibagikan bagi pemegang saham, dalam hal ini merupakan pendapatan bagi pemerintah daerah (Bastian, 2001).
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Termasuk dalam jenis pendapatan ini adalah pendapatan bunga deposito, jasa giro, hasil penjualan surat berharga investasi, pendapatan dari ganti rugi atau kerugian/kehilangan kekayaan daerah, denda, penggantian biaya dan lain-lain.

b. Dana Perimbangan

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pada suatu periode APBD terdiri dari tiga komponen yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan akan tetapi proses penyusunan berbeda dari lembaga yang berbeda (Halim, 2002).

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah dalam APBD dikelompokkan sebagai berikut: (a) Belanja operasi, merupakan jenis belanja yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik; (b) Belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya dapat diperoleh lebih dari satu tahun dan dilakukan untuk menambah aset atau kekayaan daerah, yang mana dari aset atau kekayaan tersebut akan menimbulkan belanja lainnya; dan (c) Belanja tak terduga, yaitu belanja tidak terduga adalah belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat ter-

gantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan, yang diwujudkan dalam pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi suatu daerah dalam memenuhi belanjanya sekaligus menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah, disamping itu pendapatan asli daerah memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Semakin banyak pendapatan asli daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat.

Penelitian mengenai pengaruh pendapatan daerah terhadap pengeluaran daerah sudah pernah dilakukan antara lain oleh Azis *et al* (2000), Bleckley (1986), Joulfaian dan Mokeerjee (1990), Legrenzi dan Milas (2001), Von Furstenberg *et al* (dalam Sukriy dan Halim, 2003), Maimunah (2006), Kesumadewi dan Rahman (2007). Dalam beberapa penelitian, hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah disebut dengan *tax-spend hypothesis*. Hipotesis ini mengandung makna bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam menganggarkan belanja daerah disesuaikan dengan pendapatan daerah yang diterima.

Tujuan pemberian dana alokasi umum adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan. Jaminan keseimbangan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat. Sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu

untuk mempercepat pembangunan disamping itu tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah, dengan demikian dana alokasi umum terhadap belanja daerah.

Di sisi lain, transfer yang diterima dari pemerintah pusat juga turut mempengaruhi besarnya anggaran belanja daerah yang akan dianggarkan oleh Pemerintah Daerah. Legrenzi dan Milas (2001) dalam Kesumadewi dan Rahman (2007) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel *munaci-palities* di Italia dan memperoleh hasil bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja daerah. Kebijakan-kebijakan daerah jangka pendek yang dibuat pemerintah daerah sangat bergantung pada transfer yang diterima. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H_{a1} : PAD dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap BD kota dan kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan

H_{a2} : PAD dan DAU secara parsial berpengaruh signifikan terhadap BD kota dan kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan

Flypaper Effect

Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan men-transfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Di samping dana perimbangan tersebut, pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan dan lain-lain pendapatan. Kebijakan pendanaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Flypaper Effect merupakan suatu kondisi keuangan pemerintah daerah yang membelanjakan lebih banyak dan lebih boros dengan menggunakan dana transfer atau Dana Alokasi Umum dibandingkan dengan menggunakan dana sendiri atau Pendapatan Asli Daerah.

Oates (1999) dalam Kesumadewi dan Rahman (2007) menyatakan bahwa beberapa penelitian mengenai perilaku pemerintah daerah dan merespon transfer pemerintah pusat yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa respon pemerintah daerah berbeda untuk transfer dan pendapatan daerahnya sendiri.

Penelitian tentang analisis pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah dilakukan oleh Maimunah (2006) dan Kesumadewi dan Rahman (2007) dengan mengambil sampel kabupaten dan kota di Pulau Sumatera serta Kabupaten dan Kota di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara terpisah maupun serempak DAU dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah, baik tanpa lag maupun dengan lag. Ketika diregres secara serempak baik dengan lag maupun tanpa lag, pengaruh DAU lebih kuat daripada PAD. Ini berarti telah terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka hipotesis untuk mengetahui ada tidaknya *flypaper effect* yakni:

H_{a3} : Pengaruh DAU 2010 terhadap BD 2010 lebih besar daripada pengaruh PAD 2010 terhadap BD 2010 pada kota dan kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Berdasarkan tipenya, penelitian ini termasuk penelitian eksplanatif yang merupakan penelitian untuk mendapatkan penjelasan mengenai hubungan (kausalitas) antar variabel, melalui pengujian hipotesis yang dikembangkan dari telaah teoritis.

Populasi Penelitian

Populasi penelitian adalah daerah kota dan kabupaten di propinsi Kalimantan Selatan sebanyak 2 buah kota yaitu kota Banjarmasin dan kota Banjarbaru serta 11 buah kabupaten adalah Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Kota-baru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tapin, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Definisi Operasional Variabel

a. Variabel Dependen

Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Belanja Daerah (Y) yaitu semua pengeluaran pemerintah daerah yang dikeluarkan dalam satu periode anggaran.

b. Variabel Independen

Pendapatan Asli Daerah (X_1) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Dana Alokasi Umum (X_2) yaitu dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Daerah (BD) yang terdapat pada laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota dan kabupaten di propinsi Kalimantan Selatan secara triwulan pada tahun 2010, yang diperoleh dari situs departemen keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (www.djapk.go.id) dan data dari situs www.kalselprov.go.id.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, model yang digunakan untuk menganalisis data atau menguji hipotesis berbentuk Model Regresi Linier Berganda (*Multiple Linier Regression Model*) menggunakan program SPSS versi 16,0. Adapun bentuk persamaan model regresi sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Belanja Daerah

β_0 = *Intercep* (titik potong antar garis regresi)

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien regresi dan estimator dari parameter

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Dana Alokasi Umum

ε = Variabel pengganggu

Pada penelitian ini dilakukan uji asumsi regresi berganda, yaitu multikolinieritas, heteroskedastisitas dan otokorelasi. Selain dilakukan uji asumsi regresi berganda, juga dilakukan uji normalitas, yaitu untuk menguji apakah variabel dependen dan variabel independen di dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Pengaruh PAD dan DAU secara simultan terhadap BD dianalisis dengan menggunakan uji F, yaitu dengan memperlihatkan signifikansi nilai F pada output perhitungan dengan tingkat alpha 5%. Jika nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 5% maka terdapat pengaruh antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.

Berdasarkan tabel 1, diketahui nilai uji F sebesar 34.854 dengan signifikansi 0,000. dimana disyaratkan nilai signifikansi $F < 5\%$. Dengan demikian disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini bahwa: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah kota dan kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan dapat diterima.

Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Dana Umum mempunyai hubungan yang signifikan dengan Belanja Daerah, hal ini dapat dilihat dari nilai R yaitu sebesar 0,812 yang mendekati angka 1, sedangkan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum mampu menjelaskan perubahan Belanja Daerah sebesar 65,9 % berdasarkan nilai R *Square*, sisanya sebesar 34,1 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Sebagaimana yang tersaji pada tabel 2.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Maimunah (2006) dan Kesumadewi, Rahman (2007) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Tabel 1. ANOVA^b

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	501.345,513	2	250.672,757	34,854	0,000 ^a
	Residual	258.915,384	36	7.192,094		
	Total	760.260,897	38			

Tabel 2. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,812 ^a	0,659	0,641	84,806214	2,102

Tabel 3. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-2,322	29,774				
	PAD10	1,407	0,222	0,621	6,326	0,000	0,983 1,017
	DAU10	1,213	0,195	0,611	6,231	0,000	0,983 1,017

Pengujian Hipotesis Kedua

Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan uji t. Uji t dilakukan dengan membandingkan P value t hitung yang dihasilkan oleh masing masing variabel independen dalam persamaan regresi dengan derajat signifikansinya (α) yaitu 0,05. Kriteria yang digunakan untuk menarik kesimpulan hipotesis yang diajukan yaitu jika P value t hitung < α ($\alpha = 0,05$) maka H_0 ditolak.

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui secara matematis model fungsi linier berganda dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = - 2,322 + 1,407X_1 + 1,213X_2$$

Nilai t hitung untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar 6,326 dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,005. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Adapun nilai t hitung untuk Dana Alokasi Umum sebe-

sar 6,231 dengan nilai signifikansi 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,005 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Dengan demikian hipotesis kedua yang diajukan dapat diterima.

Kenaikan dalam pajak akan meningkatkan belanja daerah sehingga akhirnya akan memperbesar defisit. Ini juga disebabkan karena PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah (Mardiasmo, 2002). Belanja daerah adalah segala bentuk kewajiban daerah selama periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah

terdiri dari Belanja Aparatur Daerah, Belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dan Belanja Tak terduga. Jadi semakin besar pendapatan yang diperoleh dari PAD maka semakin besar pula dana yang harus disalurkan lewat belanja daerah untuk melaksanakan pemerintah daerah.

Pengujian Hipotesis Ketiga

Setelah diperbandingkan nilai t hitung yang menunjukkan besarnya pengaruh dari kedua variabel tersebut terhadap belanja daerah, diketahui bahwa pengaruh pendapatan asli daerah lebih besar dari pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah sehingga hipotesis ketiga yang diajukan ditolak.

Hipotesis ketiga yang diajukan merupakan indikator untuk mengetahui *flypaper effect*. *Flypaper Effect* merupakan suatu kondisi keuangan pemerintah daerah yang membelanjakan lebih banyak atau lebih boros dengan menggunakan dana transfer atau Dana Alokasi Umum dibandingkan dengan menggunakan dana sendiri atau Pendapatan Asli Daerah.

Untuk menentukan apakah terjadi *flypaper effect* pada keuangan pemerintah daerah maka pengaruh dana alokasi umum harus lebih besar dari pada pengaruh pendapatan asli daerah. Dari tabel yang disajikan sebelumnya diketahui bahwa pada pemerintah daerah kota dan kabupaten di propinsi Kalimantan Selatan pada realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja daerah tahun 2010, pengaruh pendapatan asli daerah lebih besar dari pada dana alokasi umum, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi *flypaper effect* pada keuangan daerah pemerintah kota dan kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2010.

Sebagaimana laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan bahwa Pendapatan Asli daerah yang merupakan salah satu komponen penting dalam APBD Kalimantan Selatan tahun 2010, termasuk berada di peringkat ke 11 PAD tertinggi dari 33 Provinsi di Indonesia berdasarkan data yang dilansir Kementerian Keuangan Republik Indonesia, walaupun sedikit di bawah Provinsi Riau, akan tetapi berada satu tingkat lebih baik dari provinsi Bali. Hal ini mengindikasikan kemandirian daerah dan kemampuan berotonomi telah semakin baik dan solid. Komponen Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi kepada APBD Kalsel Rp 1.319.159.210.382,28 atau 57,05%, lebih tinggi dibanding 2009 yang kontribusinya 48,42%. Komponen Pendapatan Asli Daerah meliputi pos pajak daerah, pos retribusi daerah, pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan komponen dana perimbangan memberikan kontribusi kepada APBD Rp 974.845.208.772 atau 42,15% yang terdiri dari pos bagi hasil pajak, pos bagi hasil bukan pajak, pos Dana Alokasi Umum dan Pos Dana Alokasi Khusus. Adapun komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah memberikan kontribusi 0,80% kepada APBD yaitu sebesar Rp 18.388.095.969,49.

PENUTUP

Simpulan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada kota dan propinsi di Kalimantan Selatan. Adapun besarnya pengaruh kedua variabel 65,9% yang berarti bahwa Belanja Daerah tidak hanya dipengaruhi oleh PAD dan DAU tetapi dipengaruhi juga oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini sebesar 34,1%.

Berdasarkan pengujian secara parsial diketahui bahwa PAD dan DAU terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah pada kota dan propinsi di Kalimantan Selatan pada tingkat kepercayaan 95%. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikan t (p) lebih kecil dari pada taraf signifikan yang dikehendaki 0,05.

Untuk menentukan apakah terjadi *flypaper effect* pada keuangan pemerintah daerah maka pengaruh dana alokasi umum harus lebih besar dari pada pengaruh pendapatan asli daerah. Dari hasil penelitian ini diketahui pada realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja daerah tahun 2010, pengaruh pendapatan asli daerah lebih besar dari pada pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi *flypaper effect* pada keuangan daerah pemerintah kota dan kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2010.

Saran

Bagi pemerintah daerah kota dan kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan sebaiknya meningkatkan PAD dengan melakukan inovasi dan menggali potensi daerah di luar pajak daerah, sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani oleh pajak, kemudian menggunakan semua pendapatan baik yang berasal Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Alokasi Umum secara tepat sasaran agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu perlu perencanaan yang tepat dalam menyusun anggaran belanjanya.

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan memasukkan aspek kebijakan publik, manajemen keuangan, perilaku pemda dalam mengalokasikan sumber daya yang di-

miliki daerah, serta memperhatikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sukriy dan Halim, Abdul, 2003. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*, Simposium Nasional Akuntansi VI, Yogyakarta.
- Azis, Mariam Abdul, Muzafar Shah Habubullah, WNW. Azman Saini dan M Gazali, 2000. *The Causal Relationship Between Tax Revenue and Government Spending In Malaysia*, Universitas Putra Malaysia, Working Paper.
- Bastian, Indra, 2001. *Manual Akuntansi Keuangan Daerah*, Yogyakarta, PPA FE UGM.
- Halim, Abdul, 2002. *Seri Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat.
- Kusumadewi, Dewi Ayu dan Rahman, Arif, 2007. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia*, JAAI Volume 11 No.1.
- Maimunah Mutiara, 2006. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*, Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang.
- Republik Indonesia, 2004. Undang-undang Republik Indonesia No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.